

Hikayat Pattani dan Eksistensi Masjid di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand dalam Pusaran Harmoni dan Konflik

Tri Ramadhan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
Email : tri.ramadhan20@mhs.uinjkt.ac.id

Keywords:

Islam, Thailand, History, Conflict, Assimilation

Abstract:

Thailand is one of the most famous kingdoms in Southeast Asia that still exists today. The Kingdom of Thailand comes from the original name “Muang Thai” (formerly called Siam). Islam grew in Thailand is the fruit of a long process. Since the 9th century, Islam has entered Thai society with limited conditions. Islamic teachings have grown and existed in Thailand through various historical events from the classical period (9th century) to modern times (early 21st century). This study aims to explore the history of the development of Islam and the conflicts that occurred in Thailand. The research method used in this article is a critical historical method with a literature study approach. The description of the conflict and its accommodation process that occurred in Thailand is expected to be used as an additional academic reference and an example for relevant stakeholders to stimulate inter-religious harmony in Indonesia, given the issues of tolerance and radicalism that had surfaced.

Kata kunci:

Islam, Thailand, Sejarah, Konflik, Asimilasi

Abstrak:

Thailand merupakan salah satu kerajaan tersohor di Asia Tenggara yang masih eksis hingga saat ini. Kerajaan Thailand berasal dari nama asli “Muang Thai” (sebelumnya disebut Siam). Agama Islam tumbuh di Thailand merupakan buah dari proses yang cukup panjang. Sejak abad ke 9, Islam sudah masuk ke masyarakat Thailand dengan kondisi terbatas. Ajaran Islam telah tumbuh dan eksis di Thailand melalui berbagai peristiwa sejarah dari masa klasik (abad 9) hingga masa modern (awal abad 21). Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sejarah perkembangan Islam, asimilasi, dan konflik yang terjadi di Thailand. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah kritis dengan pendekatan studi kepustakaan. Deskripsi konflik dan proses akomodasinya yang terjadi di Thailand diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi akademis tambahan dan salah satu contoh bagi *stakeholder* terkait untuk menstimulasikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia mengingat isu toleransi dan radikalisme sempat mengemuka.

Received: January 8, 2022. Revised: March 16, 2022. Accepted: Revised: March 20, 2022

1. Pendahuluan

Thailand merupakan salah satu kerajaan tersohor di Asia Tenggara yang masih eksis hingga saat ini. Kerajaan Thailand berasal dari nama asli “Muang Thai” dan bersebelahan langsung dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia di selatan, serta Myanmar di barat. Secara historis, Kerajaan Thailand dahulu disebut sebagai Siam hingga tanggal 11 Mei 1949. Dari sisi etimologis, kata “Thai” mengandung arti “kebebasan” sesuai dengan bahasa Thai yang digunakan sehari-hari oleh suku Thai (Ghosh, 2017: 124). Sementara kata “Siam” sendiri masih digunakan dalam konteks primordial di kalangan warga Thai asli dan kaum etnis Tionghoa Thailand yang berarti “Merdeka” (Busrowi, 2008: 1). Sekarang Thailand menggunakan kata “Prades Thailand” sebagai nama resmi dalam berbagai acara kenegaraan.

Komposisi penduduk Thailand berdasarkan agama cukup heterogen dengan luas wilayah 512.820 km². Mayoritas orang Thai menganut agama Buddha (kurang lebih 95%), kemudian diikuti Islam (4,29%), dan penganut agama lain (1,21%). Kaum Muslim Thailand kebanyakan hidup di wilayah Thailand bagian selatan, terutama Pattani, Yala, dan Narathiwat, serta dua provinsi lainnya, Songkhla dan Satun. Estimasi penduduk beragama Islam di Thailand sebanyak 2,9 juta jiwa dari total penduduk Thailand yang berada pada angka 66.558.935 jiwa (<http://web.nso.go.th> 16/5/2021).

Islam masuk di Thailand sekitar abad ke-9 dan berkembang pesat sejak akhir abad 15. Penyebaran ini tidak bisa dipisahkan dari peran para pendatang dan pedagang yang ramai mengunjungi Thailand. Muslim tersebar di seantero Thailand, bahkan di Bangkok juga terdapat *Islamic Center* dan beberapa komunitas Muslim, seperti Kampung Jawa. Akan tetapi, karena Thailand merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha, maka Islam tetap dianggap menjadi minoritas sehingga terciptalah masyarakat multikultural di sana (Zamroni, *et.al.*, 2020: 3791-3792). Kaum Muslim minoritas terbanyak bisa dilihat di wilayah Thailand Selatan. Di wilayah selatan, kaum Muslim umumnya berasal dari etnis Muslim Melayu yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pattani sebagai entitas politik terbesar mulai dari abad 17. Alur sejarah kemudian berubah, sejak tahun 1902 Kesultanan Pattani digabungkan dan dijadikan sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Siam. Penggabungan ini menjadi akar konflik yang terlihat jelas sampai saat ini.

Kerajaan Siam telah berupaya mengimplementasikan pola-pola asimilasi antara etnis Thai dengan Melayu di selatan. Proses asimilasi ini ternyata sulit dilakukan dan justru muncul resistensi-resistensi terhadap hegemoni pemerintahan di Bangkok. Asimilasi yang diimplementasikan terbagi dalam sejumlah bentuk, mulai dari yang kelihatan jelas hingga terselubung, bahkan ada yang mengandung unsur paksaan (Setiarini, dkk, 2021: 27). Proses penyatuan sistem yang mulanya berdasarkan budaya Melayu dan Islam diubah sehingga tidak lagi menjadi sistem utama. Hal tersebut tampak nyata pada transformasi pendidikan dan sistem peradilan di tiga wilayah Thailand Selatan. Pemerintah Thailand juga memberlakukan UU Darurat Militer yang berarti militer diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan dan gejala pada masyarakat sipil. Oleh sebab itulah, lahir organisasi perjuangan dan peristiwa perlawanan kerap terjadi di selatan. Konflik keagamaan di Thailand sudah lama terjadi dan hingga kini masih dirumuskan untuk menyelesaikan konflik tersebut, meskipun saat ini kondisi di Thailand Selatan berlangsung pulih. Untuk mengetahui akar historis, eksistensi komunitas-komunitas Muslim, narasi berbagai perlawanan, serta resolusi penyelesaian konflik di Thailand akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dengan demikian, artikel ini menjadi semacam uraian kronologis dan narasi komprehensif bagaimana perkembangan eksistensi umat Islam di Thailand dalam lintasan sejarah, mulai dari proses Islamisasi, harmoni, konflik, hingga akomodasi yang dilakukan untuk mencapai kerukunan antarumat beragama di Thailand secara jangka panjang.

2. Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah yang naratif dan empiris. Metode yang dipakai adalah metode sejarah kritis (heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi) melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Sejumlah buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan sejarah Islamisasi di Thailand sudah beberapa kali ditulis, baik penulis Indonesia atau luar negeri. Akan tetapi, tulisan sejarah yang sudah ada masih perlu adanya penambahan analisis secara komprehensif. Pada dasarnya kajian sejarah Islam di Thailand sudah ada, namun cenderung bersifat sektoral (bagian yang terpisah-pisah) sehingga belum menjadi sebuah narasi yang utuh dan holistik tentang historisitas umat Islam di Thailand. Di sinilah letak *research gap*-nya. Fokus penelitian ini adalah menyajikan narasi kesejarahan berkenaan dengan perkembangan Islam, konflik yang terjadi, dan bagaimana umat Islam tetap dapat bertahan meskipun menjadi golongan minoritas di Thailand berdasarkan kronologis. Isu minoritas merupakan sebuah isu yang selalu menarik untuk dikaji. Sumber

sejarah pada masa kontemporer yang bisa dikumpulkan sesuai dengan topik artikel ini antara lain sejumlah buku, jurnal, makalah seminar, media resmi, dan lain-lain. Kemudian, dilakukan verifikasi terhadap sumber-sumber tersebut dan masuk ke tahap interpretasi (analisis). Analisis dilakukan dengan mencerna sumber-sumber valid secara terstruktur dan empiris yang akhirnya ditransformasikan ke dalam bentuk tulisan. Tahap akhir adalah historiografi atau penulisan kembali hasil interpretasi yang telah dijalankan sebelumnya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tempat-tempat penelitian yang berada di luar negeri, tepatnya negeri Thailand dan juga situasi pandemi Covid-19 sehingga sumber dalam penelitian kualitatif historis ini lebih mengandalkan sumber sekunder dibandingkan primer. Keterbatasan tersebut skiranya tidak menyurutkan semangat untuk menyusun sebuah artikel sejarah perkembangan Islam di Thailand yang lebih komprehensif (Gottschalk, 1985: 35).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Masuk dan Berkembangnya Islam di Thailand

Masuknya agama Islam di Thailand merupakan sebuah proses panjang. Diperkirakan Islam tiba di Thailand sekitar abad 10 Masehi melalui kontak perniagaan (Aphonsuvan, 2003: 7). Bahkan ada yang menyatakan Islam telah masuk pada abad 7 (Chapakia, 2000: 18). Kemudian, penyebaran ini dilanjutkan oleh sejumlah guru sufi yang berasal dari Jazirah Arab dan pesisir India. Sementara, bukti lain menyebutkan bahwa Islam masuk ke Thailand dari Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Bukti tersebut ialah batu nisan yang beraksara Arab di dekat Kampung Teluk Cik Munah, Pekan Pahang dengan perkiraan sudah ada sejak 1028 M.

Terdapat dua teori yang mengeksplanasikan proses Islamisasi. Bagi sebagian sejarawan teori pertama cukup kuat, karena Islam yang berada di wilayah Thailand Selatan banyak mendapat pengaruh dari Arab. Fakta membuktikan ada lukisan kuno yang mendeskripsikan pengaruh bangsa Arab di Ayutthaya. Berdirinya Kesultanan Pattani yang diinisiasi oleh bangsa Arab menyatakan Islam sudah ada sejak berabad-abad silam di Thailand bahkan sebelum Dinasti Chakri ada.

Kemudian, untuk teori kedua, Scupin (1980) menceritakan bahwa suatu ketika pernah Kerajaan Samudera Pasai ditaklukan oleh Kerajaan Siam, Sultan Pasai dan anggota kesultanan ditawan oleh Kerajaan Siam dan dibawa ke Siam. Kemudian, melalui diplomasi akhirnya sebagian dibebaskan dan kembali ke Aceh. Akan tetapi, ada juga yang menetap di Siam (Thailand) serta menyebarkan ajaran Islam di Thailand, khususnya wilayah selatan yang bertetangga langsung dengan wilayah Malaysia.

Ada teori baru yang cukup menarik mengenai Islamisasi di Thailand. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk melalui Champa. Satu bukti kuat adalah penemuan batu nisan berangka tahun 893 H. Memang Champa sempat dikuasai oleh Dinasti Islam selama ratusan tahun. Masyarakat Champa sendiri sempat diduga kuat berafiliasi dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu, tetapi sebuah tragedi besar menimpa Champa. Pada tahun 1693 terjadi serangan besar oleh tentara Dai Viet sehingga Kerajaan Champa sudah berada di bawah kekuasaan dinasti keluarga Nguyen (Tze Ken, 2004: 3). Setelah peristiwa tersebut, tidak sedikit orang Champa akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke arah selatan dan barat daya, salah satunya Thailand. Diestimasikan 4.000 suku Cham tinggal di Thailand dan mayoritas berada di Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla. Tujuan utama mereka migrasi adalah mencari penghidupan yang lebih baik. Suku Cham juga aktif membentuk komunitas Muslim di Kamboja. Suku Cham berhubungan kuat dengan etnis bangsa Austronesia lainnya. Pola penuturan bahasanya mirip dengan Melayu-Polinesia dan termasuk kategori rumpun Austronesia Aceh-Cham.

Pada masa-masa awal kedatangan Islam, pola dakwah masih berkorelasi kuat dengan tasawuf dan mistis (diperkirakan hingga abad 17). Pola dakwah ini dirasa yang paling cocok dengan karakter masyarakat karena sebelumnya mendapat asketisme Hindu-Buddha. Di samping itu, terjadi

sinkretisme antara kepercayaan lokal dengan tarekat yang cenderung lebih toleran terhadap tradisi seperti itu. Salah satu tokoh utama yang paling awal menyebarkan agama Islam di Thailand adalah Syeikh Syafiuddin Ahmad Ad Dajjani Al Qusyasyi. Beliau merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW (Azra, 1997: 247). Syeikh Syafiuddin diduga kuat yang pertama melakukan Islamisasi di Pattani, walaupun sejarawan lain ada yang menolak hipotesa tersebut karena Islam sudah ada di Pattani jauh sebelum Syeikh Syafruddin datang ke sana. Bahkan, Pattani dianggap sebagai salah satu titik asal muasal Islam berkembang di Asia Tenggara, selain Aceh.

Penyebaran Islam semakin masif terjadi pada abad 19 dengan banyaknya pekerja Muslim bermigrasi ke Siam. Para pekerja Muslim berasal dari etnis Melayu dan Jawa yang ikut membantu pembangunan Kerajaan Siam. Pembangunan beberapa kanal dan sistem pengairan di Krung Thep Mananakhon tidak terlepas dari peran para pekerja Melayu. Para pekerja ini selanjutnya berasimilasi dengan penduduk lokal dan tidak jarang dari mereka yang masuk agama Islam. Mereka juga berjasa mendirikan Ramkhanghaeng Islamic Center, pusat agama Islam terbesar di Thailand (Rusli, 2017: 45).

Untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang proses Islamisasi di Thailand, maka dapat diidentifikasi sejumlah bukti historis masuknya Islam di Thailand. Bukti-bukti tersebut antara lain (1) batu nisan berhuruf Arab di sekitar Kampung Teluk Cik Munah Pekan Pahang sejak tahun 1028 M, (2) makam tokoh ulama terkenal seperti Syaikh Syafiuddin Ahmad Ad Dajjani Al Qusyasyi, (3) masjid Jawa di Bangkok, (4) kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi yang diajarkan di beberapa pesantren sekitar Thailand Selatan, (5) lukisan kuno yang mendeskripsikan migrasi bangsa Arab di Ayuthaya serta dukungan komunitas Arab dalam pendirian Kesultanan Pattani, dan sebagainya.

b. Riwayat Kerajaan Pattani Abad 16-20

Kesultanan Pattani merupakan sebuah kesultanan bercorak Melayu yang diperkirakan melingkupi wilayah Pattani (Thailand modern), Yala, Narthiwat, dan Songkhla. Pattani berada di bagian paling utara Malaysia. Berdasarkan Hikayat Pattani, pemerintahan Pattani dalam sejarahnya dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu (1) Sri Wangsa, (2) Kelantan Pertama, dan (3) Kelantan Kedua. Hikayat Pattani adalah sebuah manuskrip Melayu yang menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Pattani dengan karakter Melayu. Naskah tersebut memiliki jumlah halaman sebanyak 94 dan menggunakan aksara Melayu-Arab. Ibukota Pattani sesuai hikayat tersebut berada di kota Mahligai (Montessano & Jory, 2008: 80). Awal mulanya Pattani dipimpin oleh Phaya Tu Kerub Mahajana. Setelah ia wafat, kedudukannya digantikan Phaya Tu Antara yang diberi gelar Phaya Tu Nakpa. Islam masuk dan Phaya Tu Nakpa namanya berubah menjadi Sultan Ismail Syah. Nama kerajaan pun diubah jadi Pattani Darussalam (Montessano & Jory, 2008).

Islam mulai masuk ke Pattani diperkirakan kurang lebih pada abad 10-11 M dan banyak orang-orang Arab yang singgah ketika berdagang. Mereka dijuluki *khaek* oleh penduduk asli Thailand yang bermakna pendatang atau perantau. Kemudian, proses perpindahan agama penduduk Pattani berlangsung dari abad 12 hingga 15 M (Firmansah, 2018:7). Di Abad 15, Pattani berkembang pesat berkat kegemilangan Putri (Ratu) Hijau dalam memimpin Pattani sesuai alur cerita hikayat tersebut. Ratu Hijau sendiri merupakan cucu dari Sultan Ismail Syah (Harahap, dkk., 2022: 56).

Hikayat Pattani juga menceritakan bahwa Syeikh Said yang berasal dari Samudera Pasai telah berhasil mengislamkan Raja Pattani dan rakyatnya. Dalam hikayat tersebut, diceritakan mengenai seorang raja yang sedang terbaring lemah akibat sakit. Muncul sayembara bagi siapapun yang bisa mengobati sakitnya akan dinikahkan dengan anaknya karena tidak ada satu tabibpun yang mampu menyembuhkan raja. Pada saat itulah Syeikh Said datang dan mencoba menyembuhkan sang raja, namun dengan syarat apabila raja sembuh, maka raja harus masuk Islam. Sang raja menyetujui syarat tersebut dan tidak lama kemudian sembuh. Akan tetapi, raja tidak menepati janji untuk masuk Islam dan tiba-tiba jatuh sakit lagi. Hal tersebut terjadi hingga tiga kali. Akhirnya, sang raja benar-benar

masuk Islam. Tidak hanya dirinya, raja juga mengajak seluruh rakyatnya masuk Islam serta mengubah pola bidang-bidang kehidupan masyarakat Pattani menjadi bernafaskan ajaran Islam.

Islam memang membawa perubahan dalam bidang pemikiran, kebudayaan, politik, sosial, dan pendidikan. Setelah Islam berkembang di Pattani, maka syahbandar atau Pelabuhan Pattani berhasil menarik perhatian para pedagang dari berbagai negara seperti Siam, Jepang, Tiongkok, dan Melayu. Pattani muncul sebagai wilayah kosmopolitan baru di Asia Tenggara (Firmansah, 2018: 8). Pelabuhan Pattani semakin ramai ketika di tahun 1511, Malaka dianeksasi oleh Portugis. Mulai saat itu, para pedagang Eropa juga tertarik untuk mendatangi Pattani sehingga ekonomi Pattani bertumbuh. Portugis pun mendatangi Pattani pertama kali di tahun 1516 dengan status perizinan untuk perdagangan.

Ketika Pattani mencapai puncak kejayaan di awal abad 17, kesultanan meletakkan beberapa landasan bagi perkembangan ilmu dan ajaran Islam. Hal ini wajar mengingat Pattani mengadakan relasi intensif dengan negara-negara Arab yang menjadi episentrum dari Islam. Para pedagang Arab juga sering mampir ke Asia Tenggara untuk berdagang sehingga Islam semakin masif berkembang. Kuatnya genealogis antara keluarga Pattani dengan Bangsa Melayu pada umumnya mencitrakan Pattani sebagai simbol kejayaan Islam di Asia Tenggara setelah Aceh dan Malaka.

Pada masa dinasti Kelantan (tiga raja awal), yaitu Raja Bakar, Raja Mas Kelantan, dan Sultan Muhammad, situasi di Pattani relatif stabil dan kondusif karena Kerajaan Siam sedang fokus untuk menghalau serangan Burma dalam perang selama sembilan tahun (1767-1776). Yuniarto (2005: 96) menjelaskan bahwa sesudah perang Burma-Siam selesai, Raja Siam kemudian mengirim delegasi ke Pattani, namun ditolak oleh Sultan Muhammad. Tidak lama kemudian, terjadi peperangan frontal antara Siam-Pattani, tetapi akibat persiapan yang kurang, akhirnya Pattani berhasil dikalahkan oleh Siam di tahun 1786.

Kekalahan Pattani di tahun 1786 menandakan bahwa kesultanan tersebut mulai berada di bawah pengaruh Siam. Peraturan perundangan kesultanan dipaksa diubah menjadi UU Kerajaan Siam dan Sultan Muhammad digantikan oleh Sultan Lamidin. Meskipun demikian, secara diplomatis, Sultan Lamidin mengirimkan delegasi ke Vietnam untuk menemui Raja Annam dalam rangka menghadapi Siam. Namun, ternyata surat itu bocor dan terbaca oleh Raja Siam. Akhirnya, Raja Siam mengirimkan ekspedisi militer kembali untuk menundukkan Pattani. Kedudukan Sultan Lamidin diganti oleh Datuk Pangkalan sebagai raja baru Pattani. Penunjukkan Datuk Pangkalan pun bersifat kontroversi karena ternyata Datuk Pangkalan juga memberontak terhadap Siam sehingga Siam dengan terpaksa menunjuk Nai Khuan Sai sebagai raja Pattani. Hal ini menandai akhir dari pengaruh bangsa Melayu di Pattani.

Nai Khuan Sai atas nama Kerajaan Siam segera melakukan pembagian Pattani menjadi enam wilayah dengan masing-masing penguasa wilayah yang diangkat sesuai prosedur kerajaan (Yaacob, 2020: 21). Sejak saat itu, pemerintah Siam juga mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang cukup diskriminatif bagi kaum muslim Pattani. Kuat dugaan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka mensubstitusikan agama dan kultural kaum Pattani dari Melayu menjadi bangsa Siam. Kemudian, kekuasaan Kerajaan Pattani dapat dikatakan benar-benar berakhir setelah persetujuan Traktat Anglo-Siam di tahun 1902.

c. Kampung Jawa di Bangkok: Sebuah Jejak Perkembangan Islam Abad 19-20

Kampung Jawa merupakan salah satu lingkungan di ibukota Thailand, Bangkok, yang berpenduduk kurang lebih 3.000 jiwa dengan kekhasan budaya Jawa dan beragama Islam. Lokasi dan tanah Kampung Jawa sebenarnya berasal dari pemberian resmi Kerajaan Thailand. Awal mulanya, Raja Thailand mengadakan kunjungan ke Jawa tahun 1896 dan meminta bantuan kepada raja-raja Jawa berupa penyediaan tenaga kerja dalam rangka konstruksi bangunan kerajaan baru. Sang Raja Thailand kemudian menyatakan akan menyediakan tempat tinggal bagi pekerja ini (Brata, 2018:603). Tetapi setelah proyek konstruksi selesai, tidak sedikit dari para pekerja ini tidak kembali ke Jawa (Brown, 2013: 19).

Sejumlah sumber mengatakan imigran-imigran Jawa ini lebih memilih bertahan di Siam dari pada pulang ke Jawa yang waktu itu masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Hal ini ditambah kondisi Hindia-Belanda yang sedang tidak stabil menjelang Perang Dunia ke-2. Hindia-Belanda menerapkan kebijakan represif sehingga warga Hindia Belanda yang berada di luar negeri tidak dapat kembali. Tidak hanya para pekerja, kaum priyayi dan tokoh masyarakat Hindia-Belanda juga tidak bisa kembali. Salah satu tokoh yang waktu itu tidak dapat kembali ke tanah air adalah Irfan Dahlan. Beliau adalah putra dari KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Waktu itu beliau pergi ke Pakistan untuk studi di tahun 1924. Ketika akan kembali menuju Hindia-Belanda, proses kepulangannya tidak berjalan baik, bahkan ia terpaksa menetap di Thailand dan tinggal di Kampung Jawa. Hal ini berlanjut hingga cucu sang pencerah bernama Winai Dahlan. Beliau bersama-sama dengan Walidah Dahlan cukup aktif sebagai tokoh berpengaruh di Kampung Jawa dan Masjid Jawa.

Masjid Jawa sendiri merupakan masjid yang dibangun oleh komunitas Muslim di ibukota Thailand. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik H. Muhammad Saleh, seorang imigran Jawa pada tahun 1906. Anak dan cucu dari tokoh pendiri masjid ini kini sudah menjadi Warga Negara Thailand dan berbicara bahasa Thai dalam kehidupan sehari-hari (Brown, 2013). Keunikan masjid ini adalah corak arsitektur Jawa dengan tembok berwarna hijau muda dan atap meru berundak tiga. Bangunan utama masjid bagian dalam berbentuk persegi dengan empat penyangga di bagian tengah. Masjid yang mampu menampung lebih dari 200 jemaah ini menggunakan pintu yang terbuat dari kayu sebanyak tiga buah. Sementara itu, di bagian depan masjid ada sebuah mimbar kayu yang dilengkapi tangga. Sebagai pelengkap, jam lonceng diletakkan di sebelah kanan dan kiri yang terbuat pula dari kayu. Ornamen pilar, langit-langit, mimbar serta jendela jelas terlihat mendapat pengaruh dari Indonesia, khususnya Jawa.

Selain masjid, terdapat madrasah dengan jumlah siswa mencapai ratusan orang. Madrasah tersebut rutin mengadakan pengajian Alquran setiap hari, baik untuk tingkat dewasa maupun anak-anak. Di seberang masjid terdapat areal pemakaman Muslim dan di sebelah kiri masjid ada prasasti peresmian masjid beraksara Thai. Kampung Jawa merepresentasikan eksistensi umat Islam di pusat sebuah kerajaan Buddha. Mereka juga pandai berbahasa Inggris sehingga mudah diwawancarai oleh sejumlah awak media. Sebagaimana yang tertulis sebelumnya, Winai Dahlan kini menjadi tokoh sentral Kampung Jawa dan menjadi seorang professor di Universitas Chulalongkorn. Saat ini, Prof. Winai Dahlan juga merupakan pengagas Halal Science Center di kampus tersebut (Perdani, 2013).

Meskipun selama lebih dari satu abad, masyarakat Jawa sudah berasimilasi dengan masyarakat Thailand pada umumnya, bahkan sudah menjadi Warga Negara Thailand, namun sisa-sisa budaya Jawa tetap ada di Kampung Jawa (Lockard, 1971: 43). Meskipun hanya sedikit dari mereka yang bisa bertutur bahasa Jawa, tetapi sejumlah prosesi adat dan tradisi Jawa masih mereka pertahankan (Brata, 2018: 604). Sebagai contoh prosesi kenduren selama tiga hari dan tujuh hari sewaktu ada orang yang meninggal dunia kerap dilaksanakan. Tradisi besar lainnya ialah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyediakan makanan khas seperti sate dan mie lontong. Selanjutnya, apabila memasuki bulan Ramadan, budaya takjil atau buka puasa bersama dengan kue cucur dan es cao juga kerap dilakukan. Tidak hanya sebatas kuliner ketika perayaan-perayaan Islam, kuliner khas Jawa juga masih mengakar dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nagasari dan ambengan nasi kuning. Nagasari yang biasanya disajikan di Yogyakarta dan Surakarta (Solo) ternyata tidak kalah enakya ketika disajikan di Kampung Jawa. Cita rasa kuliner khas Jawa yang kuat serta proses enkulturasi Jawa-Islam masih berlangsung dengan cukup baik, meskipun berada di ibukota sebuah kerajaan Buddha.

d. Perkembangan Islam dan Konflik Keagamaan di Thailand Modern Abad 20-21

Kaum Muslim di Thailand tidak sebaik kondisinya jika dikomparasikan dengan kaum Muslim di Malaysia. Pemerintah Malaysia sangat mendukung pembangunan dan penyediaan sarana dakwah serta ibadah hampir di setiap wilayahnya. Para imam, penceramah, bilal, marbot, dan pengurus masjid

digaji langsung oleh pemerintah. Dari aspek pers, pemerintah Malaysia juga mempersilakan media TV dan radio untuk melakukan siaran dakwah Islam setiap hari.

Wilayah Thailand Selatan kerap kali menjadi tempat terjadinya konflik berbasis agama dan ras hingga kini. Konflik di Thailand Selatan modern terjadi sejak adanya penyerahan wilayah utara Malaya dari tangan pemerintah kolonial Inggris kepada Kerajaan Siam. Penyerahan tersebut tertuang dalam Traktat Anglo-Siam (1902) yang ternyata di dalamnya juga termaktub pencabutan hak-hak warga Muslim Pattani. Oleh karena itu, lahirlah gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah Kerajaan Siam (kemudian Kerajaan Thailand) yang dianggap sebagai bentuk separatisme dan terorisme sehingga pemerintah Thailand menerapkan status darurat militer di Thailand Selatan (Azmi, *et.al.*, 2019: 630-631).

Pada tahun 1921 pemakaian bahasa Melayu direduksi dengan mengganti bahasa pengantar di sekolah menjadi bahasa Thai serta melakukan pemungutan pajak lebih tinggi sehingga membuat kehidupan ekonomi semakin sulit. Kemudian, di tahun 1922 terjadi pemberontakan Namsai oleh bangsawan Kerajaan Pattani kepada pejabat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Awal abad ke-20 merupakan fase perubahan konstitusi yang mentransformasikan bentuk pemerintahan di Thailand menjadi monarki konstitusional. Kaum muslim dilibatkan dalam pemilihan anggota legislatif dan umat Islam di selatan berharap ada pembaharuan. Tetapi, bentuk pemerintahan ini sepertinya merupakan sebuah langkah menuju oligarki kekuasaan. Pada tahun 1932 terjadi sebuah kudeta oleh seorang perwira militer Phibun Songkhram. Ia mengubah nama Siam menjadi Thai karena ia ingin etnis Thai lebih diutamakan dari yang lain. Ia punya slogan "Thai people, Truly Thai" dan atas dasar kalimat tersebut kaum Muslim Melayu dipaksa menjadi Thai yang tunduk kepada budaya Thai dalam kehidupan (Amir, 2013: 99).

Pasca jatuhnya kekuasaan Phibun Songkhram di tahun 1944, pemerintahan baru di Thailand lebih toleran terhadap etnis minoritas. Kebijakan asimilasi paksa dihentikan serta dikeluarkanlah peraturan perundangan baru bernama *Patronage of Islam Act* yang bersifat mengayomi umat Islam. UU ini awalnya diharapkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap kaum Muslim Melayu. Substansi UU ini menyatakan pemimpin agama mendapatkan pengesahan dan posisi ulama dipandang terhormat dalam anggota Dewan Islam sehingga secara kasat mata UU ini terlihat pro-Muslim, namun sesungguhnya UU tidak memberi banyak dampak positif bagi kaum Muslim Melayu karena belakangan diketahui bahwa tujuan asli keluarnya UU ini ialah guna mengendalikan dan mengatur aktivitas keagamaan kaum Muslim di Thailand (Chud, 2016).

Konflik di wilayah Thailand Selatan memang tidak terlepas dari unsur-unsur agama. Bagi sebagian ahli, konflik ini mengakar pada persaingan antara kaum Muslim Melayu dengan kaum Buddhis Thai. Kuatnya pengaruh agama di masing-masing pihak mengakibatkan pertarungan teologis yang berujung kepada masalah sosiologis dan politis. Banyak dari masyarakat Thailand Selatan lebih mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim Melayu dibandingkan sebagai orang Thai. Basis perlawanan mereka setidaknya berada di tiga provinsi, yaitu Pattani, Yala, serta Narathiwat. Masyarakat di tiga provinsi ini mempunyai identitas Melayu dan keislaman yang sangat kuat. Mereka juga mulai mendirikan berbagai organisasi seperti Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pattani United Liberation Organization (PULO), dan lain-lain (McDermott, 2013:120-128).

Gerakan pertama adalah BNPP. BNPP dikenal sebagai gerakan Mujahidin Islam Pattani yang didirikan di Kelantan tanggal 9 Oktober 1970 dengan tokoh utamanya ialah Tengku Abdul Jalal bin Tengku Abdul Muthalib. Organisasi ini semakin terkenal sesudah masuknya seorang tokoh populer bernama Pok Yeh. Gerakan BNPP mendapat banyak dukungan dari golongan elit, guru agama, serta orang-orang intelektual yang bermukim di Mekkah. Orientasi utama gerakan ini adalah meminta

kemerdekaan penuh bangsa Melayu Pattani serta merealisasikan pembentukan negara Pattani yang bersendikan Islam.

Kedua, Barisan Revolusi Nasional yang didirikan tahun 1980. Kemunculan BRN ini sejalan dengan pemikiran sejumlah tokoh, seperti H. Muhammad Amin To'mina, Abdul Karim Hasan, H. Yusuf Capakya, dan Tengku Abdul Jalaluddin bin Tengku Abdul Muthalib. BRN merupakan organisasi perlawanan yang menginginkan kemerdekaan dengan jalan fisik atau mengangkat senjata. Gerakan ini memiliki basis di beberapa kota di Pattani. Organisasi BRN selanjutnya pecah menjadi beberapa gerakan yang masih berada di bawah koordinasi induknya. BRN Congress lebih fokus ke bidang kemiliteran dan BRN Coordinate lebih kepada kancah politik (Jerryson, 2012: 7). Sementara itu, BRN Ulama yang menjalankan tugas sebagai Dewan Syuro lalu menjadi Gerakan Ulama Pattani.

Kaum ulama terbukti memegang peranan penting untuk membangkitkan semangat perlawanan. Dalam konteks historis, salah satu pemberontakan ulama terbesar di Thailand ialah pemberontakan Haji Muhammad Sulong di tahun 1946. Pada tahun tersebut (masa kekuasaan Phibun Songkhram), ia memimpin aksi-aksi menuntut desentralisasi hukum bagi orang Muslim Melayu. Akibat peristiwa berdarah ini ratusan orang menjadi korban dan sebagian orang-orang Muslim Melayu mengungsi ke Malaka. Aksi resistensi H. Sulong ini sempat jadi perhatian dunia dan mengimplikasikan tekanan politik terhadap Pemerintah Thailand semakin besar dan waktu itu persoalan tersebut masuk ke dalam agenda PBB dan Liga Arab (Pitsuwan, 1982: 111-165). Walaupun didesak banyak pihak, pemerintah pusat tetap melanjutkan program asimilasi hingga berakhirnya pemerintahan Phibun Songkhram. Penggantinya Sharit Thanara berupaya memperbaiki keadaan dengan pendekatan lebih halus terhadap kaum Muslim Melayu meski program asimilasi tetap diimplementasikan secara diam-diam atau terselubung. Pelan tapi pasti infiltrasi budaya dan bahasa Thai tetap masuk sampai ke pendidikan pondok. Pondok diasumsikan sebagai benteng kuat kaum Muslim melawan penetrasi budaya baru atau budaya luar. Umat Islam diberi kemudahan memperoleh beasiswa dan bantuan finansial. Di poin inilah umat Islam mulai terpengaruh oleh nilai-nilai Thai dan terjadi perubahan struktur ekonomi masyarakat Thailand Selatan. Pasca pemerintahan Sharit, program asimilasi koersif kembali terjadi. Pemaksaan pemakaian nama Thai dan program transmigrasi penduduk dari utara ke selatan diintensifkan agar asimilasi dapat terakselerasi dengan cepat. Hal tersebut ternyata membuat stabilitas masyarakat di kawasan selatan terganggu dan gerakan perlawanan malah semakin kuat.

Ketiga, PULO merupakan organisasi yang pergerakannya paling efektif dan efisien secara struktur. Gerakan ini dibangun oleh Tengku Biro Kotanila tahun 1968 dengan prinsip agama, bangsa, tanah air, dan kemanusiaan (Ubangtapekma). PULO seringkali mengangkat isu-isu politik dan hak asasi manusia terkini yang menjadi strategi dalam menarik perhatian dunia internasional (Kumar, 2014: 55). PULO juga mengirimkan anggotanya ke luar negeri guna mempelajari dunia militer dan ketika kembali para anggota tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam pasukan khusus.

Kembali ke konteks kultural, pemakaian bahasa Melayu juga sangat kental di tiga provinsi ini. Di atas 70% warga penduduk tiga provinsi ini bisa berbahasa Melayu walaupun pemerintah sempat melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa formal di lembaga-lembaga bisnis dan pendidikan. Sementara provinsi lain di selatan seperti Satun dan Songkhla, bahasa Thai lebih kuat. Larangan ini tidak menurunkan semangat mempertahankan identitas mereka sebagai etnis Melayu. Mereka tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari di luar kegiatan formal. Bahasa Melayu mencerminkan karakter distingtif antara etnis Melayu dengan etnis Thai.

Memasuki awal abad ke 21, konflik antara etnis Melayu dengan Thai sempat mencapai titik kulminasi di tahun 2004 (McCargo, 2010: 261-281). Lebih dari 200 jiwa melayang karena konflik di Thailand Selatan. Korban banyak yang meninggal akibat tertembak atau terkena ledakan bom oleh orang tidak dikenal. Pihak pemerintah juga beberapa kali mengirimkan tentara dan polisi untuk melakukan tindakan represif terhadap kaum Muslim. Bulan April 2004 merupakan bulan berdarah, 30 orang Muslim ditembak oleh tentara Thailand di Masjid Krue Ze (Wattana, 2007: 125). Masjid Krue

Ze sendiri memiliki nilai sejarah tinggi karena dibangun pada abad ke-15 dan konon menjadi masjid tertua di negeri Gajah Putih. Masjid tersebut juga merupakan saksi sejarah relasi harmonis antara Kekhalifahan Abbasiyah dengan umat Islam di Thailand.

Peristiwa selanjutnya terjadi pada Oktober 2004, yakni sekitar 78 orang Muslim Takbai tewas di dalam perjalanan setelah mereka mengadakan protes terhadap pemerintah, serta digiring ke dalam truk ketika kondisi tangan sedang terikat. Kedua kejadian ini menimbulkan luka di hati kaum Muslim Thailand yang kemudian meningkatkan eskalasi penyerangan kepada aparat pemerintahan dan masyarakat non-Muslim. Pemerintah Thailand pun akhirnya menerapkan status darurat militer di provinsi-provinsi Thailand Selatan ini (Montessano & Jory, 2008: 71).

Kondisi Thailand Selatan waktu itu semakin tidak aman. Milisi Muslim bermunculan dan mereka tidak segan melakukan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan aparat, etnis Tionghoa, dan biksu Buddha. Hampir tiap bulan terjadi masalah instabilitas politik dan keamanan. Amerika Serikat (AS) turun tangan dengan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan “milisi dari selatan”. Selain AS, Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta Pemerintah Thailand untuk mengakhiri tindak kekerasan kepada masyarakat Muslim di wilayah Selatan. Maklumat ini menjadi salah satu poin berdasarkan hasil pertemuan Jeddah, Arab Saudi, antara Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebagai ketua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam ke 10. OKI secara gamblang meminta Thailand untuk mendamaikan suasana dan menciptakan keadilan supaya gerakan-gerakan perlawanan dapat dipadamkan. Selain itu, OKI menyatakan pihak yang paling baik dan potensial menjadi mediator penyelesaian konflik ini adalah Malaysia (Wulandari, 2018: 51-52).

Pemerintah pusat Thailand menyadari bahwa konflik tidak bisa berlarut-larut dan akhirnya mereka mulai melakukan usaha rekonsiliasi. Pemerintah Thailand mendirikan Komisi Rekonsiliasi Nasional yang bertugas melaksanakan mediasi perdamaian di wilayah selatan. Tetapi, dominasi peran tentara di Thailand menjadikan sejumlah rekomendasi komisi ini sulit diimplementasikan. Pendidikan, lowongan pekerjaan, serta bantuan pemerintah lainnya masih tidak mudah diakses sampai ke masyarakat Muslim di selatan. Persyaratan penggunaan bahasa resmi Thai dan nasionalisme integratif koersif sempat menjadi *barrier* dalam rekonsiliasi, namun kehadiran masyarakat internasional seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang membantu mediasi antara ulama dan warga Muslim di Thailand Selatan dengan pemerintah Kerajaan Thailand telah berhasil mengakomodasi dua pihak yang berkonflik (Sari, 2019: 54-64). Salah satu poin penting yang menjadi syarat rekonsiliasi adalah harapan Muslim Melayu di Selatan menggunakan kultur Melayu secara terbuka dan bisa diakui pemerintah kerajaan. Diharapkan tradisi Melayu dapat diperbolehkan berjalan di Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Sejak 2005-2013, pasca upaya rekonsiliasi dilakukan, relasi antara Kerajaan Thailand dengan warga Muslim Melayu di selatan mulai membaik (Maharani, 2018: 13-16). Terlebih sejak pengambilalihan kekuasaan di tahun 2006, upaya rekonsiliasi lebih menggema. Pemerintahan baru di Thailand melancarkan reformasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di selatan. Ini memperlihatkan keseriusan Kerajaan Thailand dalam pemerataan pembangunan. Selain itu, anggota keluarga kerajaan tercatat beberapa kali melakukan kunjungan resmi ke Thailand Selatan sebagai simbol perhatian pihak kerajaan terhadap warga Thailand Selatan.

Menurunnya konflik dan kekerasan diduga kuat berkorelasi dengan sikap akomodatif pemerintah. Selain pembangunan, pemerintah pusat lebih mengedepankan pendekatan institusionalisme dengan menerapkan sistem otonomi yang berarti kekuatan lokal dapat menentukan pemerintahannya dengan minimum ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Artinya, para Muslim mulai diberi ruang untuk menjalankan kehidupannya dengan kebebasan mengamalkan ibadah dalam ajaran Islam dan penghormatan terhadap budaya Melayu. Pemerintah pusat beritikad melindungi minoritas dan distribusi hak-hak mereka. Sewaktu penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Pemilu), orang-orang Islam diberi kesempatan untuk memilih partai politik secara bebas sesuai harapan mereka. Hal ini terbukti melalui suksesnya Pemilu di Thailand tahun 2011 yang tidak menimbulkan bentrokan besar apapun di kawasan selatan, meskipun terdapat gerakan sosial yang sempat memanas dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut (Sinpeng & Kuhonta, 2012: 389-415).

Setelah rekonsiliasi berhasil dilaksanakan sebenarnya masih ada cita-cita warga etnis Melayu yang ingin dicapai, yaitu kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Tetapi pemerintah pusat belum mengizinkan (dalam beberapa aspek tertentu), jadi mereka hingga sekarang masih memperjuangkannya. Di balik itu semua, harmonisasi kehidupan antarumat beragama dan etnis di Thailand Selatan menjadi hal utama yang ingin selalu dipertahankan. Pada akhir masa pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej, sang raja sendiri dinobatkan sebagai bapak bangsa Thailand yang mengutamakan perdamaian dan sering menjadi penengah dalam konflik dengan upaya-upaya menemukan solusi tanpa melalui tindakan kekerasan.

4. Kesimpulan

Ada dua teori Islamisasi di Thailand. Teori pertama, Islam di wilayah Thailand Selatan banyak mendapat pengaruh dari Arab dan teori kedua, Islam hadir di Thailand melalui diplomasi dan pengaruh dari Samudera Pasai di Aceh. Fakta empiris menunjukkan bahwa Islam masuk di Thailand tanpa ada unsur paksaan dan kekerasan sehingga penguasa Thailand membuka ruang berkembangnya ajaran Islam meskipun hanya di lokus tertentu. Asimilasi dan akulturasi sangat terlihat jelas di Kampung Jawa. Munculnya gerakan anti pemerintah pusat yang dilakukan kaum Muslim di Thailand Selatan pada abad 20 dan 21 disebabkan oleh disparitas ekonomi dan anggapan bahwa pemerintah pusat sebagai kolonialis, sehingga Muslim di Thailand Selatan terus menerus mendapat tekanan politis dan tindakan represif dari aparat keamanan. Pemerintah Kerajaan Thailand menyadari hal tersebut dengan mulai mendirikan Komisi Rekonsiliasi Nasional dengan didukung oleh komunitas Internasional. Pada tahun 2022, situasi keamanan di Thailand Selatan telah berangsur pulih dan warganya hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda agama dan etnis. Konflik dan tekanan terjadi, tetapi syiar Islam tetap eksis di Thailand. Penelitian ini telah membuka ruang dalam memahami bagaimana Islam sebagai agama minoritas di Thailand bisa bertahan dari konflik yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Aphornsuvan, Thanet (2003), *History and Politics of the Muslims in Thailand*. Bangkok: Thammasat University.
- Amir, Kamil (2013), "The Malays of Patani: Fighting for Identity Survival in the Thai State", *International Journal of the Malay World and Civilisation*, Vol. 1, No. 3.
- Azyumardi Azra (1997), *Jaringan Ulama Nusantara-Timur Tengah Abad XVI-XVII*. Bandung: Mizan.
- Brown, Rajeswary Ampalavanar (2013), *Islam in Modern Thailand: Faith, Philanthropy, and Politics*. London: Routledge.
- Busrowi, Muslim (2008), *Peradaban Thailand*. Semarang: Alprin.
- Chapakia, Ahmad Omar (2000), *Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand*. Kedh Darul Aman: Pustaka Darussalam.
- Chud, Thon (2016), "Thailand's Southern Insurgency: No End in Sight", *The Economist*, 2 January (dl: 15 Mei 2021).
- Cintya Wulandari (2018), "Sekuritisasi Isu Separatisme Pattani, Thailand Selatan dalam Perspektif Konstruktivisme", *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 1.

- Diny Nilam Sari (2019), “Resolusi Konflik Kelompok Separatis di Thailand Selatan (Strategi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai Mediator Konflik antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok Separatis Muslim di Thailand Selatan Tahun 2005 - 2017)”, *Skripsi S-1*. UIN Sunan Ampel.
- Ghosh, Lipi (2017), *India-Thailand Cultural Interactions: Glimpses from the Past to Present*. Singapore: Springer.
- Gottschalk, Louis (1985), *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Harahap, Koiy Sahbudin, dkk. (2022), “Analysis of Islamic Educational Policy: Thailand Case Study”, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Jerryson, Michael K. (2012), *Buddhist Fury: Religion and Violence in Southern Thailand*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Kumar, Suresh (2014) *Separatist Movement in Southern Thailand: Pattani United Liberation Organization (PULO) 2004-2010*. Selangor: IIUM, 2014.
- Lockard, C. A. (1971), “The Javanese as Emigrant: Observations On the Development of Javanese Settlements Overseas”, *Indonesia No. 11*. Ithaca: Cornell University Press.
- McDermott, Gerard B. (2013), “Barriers Toward Peace in Southern Thailand”, *Peace Review: A Journal of Social Justice*, Vol. 25.
- Nugroho Trisnu Brata (2018), “Social Mobility and Cultural Reproduction of Javanese Descendant Community in Bangkok, Thailand”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 231.
- Pitsuwan, Surin (1982), *Islam and Malay Nationalism: A Case of the Malay Muslims of Southern Thailand*. Cambridge, USA: Harvard University.
- Setiarini, Novia Isti, dkk. (2021), “Budaya Muslim Melayu Pattani Thailand Selatan”, *Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 6, No. 1.
- Sinpeng, Aim & Kuhonta, Erik Martinez (2012), “From the Street to the Ballot Box: The July 2011 Elections and the Rise of Social Movements in Thailand”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 34, No. 3.
- Teew, A & Wyatt, D.K. (1970). “Hikayat Pattani”, *Bibliotheca Indonesia 5*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Wattana, Sugunnasil (2007), “Islam, radicalism, and violence in Southern Thailand: Berjihad di Pattani and the 28 April 2004 Attacks”, *Critical Asian Studies*, Vol. 38 No. 1.
- Wong Tze Ken, Danny (2004), “Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries”, *Kyoto Review of Southeast Asia*. Kyoto, Japan: Kyoto University.
- Yaacob, Che Mohd Aziz (2020), “Isu dan Penyelesaian: Konflik Pemisah di Selatan Thailand”, *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, Vol. 38, No. 1.
- Yuniarto, Paulus Rudolf (2005), “Minoritas Muslim Thaliand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 7 No.1.
- Yuliasri Perdani (2013), “Winai Dahlan: Advancing Halal Science”, *The Jakarta Post*, 8 March (dl: 15 Mei 2021).
- Zamroni, dkk. (2020), “Multicultural Education In A Religious Life: Developing Harmony Among Religions In Southeast Asia”, *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020, diakses dari <http://www.ieomsociety.org/detroit2020/papers/744.pdf>.
- Zhuhruffa Dita Maharani (2018), “Peran Malaysia dalam menyelesaikan konflik Thailand Selatan 2005-2013”, *Tesis S-2*. UIN Syarif Hidayatullah.